

THE ROLE OF UN WOMEN ADVOCACY TOWARDS CARE ECONOMY POLICY IN INDONESIA

Estu Sarwo Mukti
23/511810/PSP/07879

ABSTRACT

This thesis examines the role of UN Women advocacy in the progress of care economy policy in Indonesia between 2018 and 2025. It begins from the recognition that unpaid care work remains one of the most persistent foundations of gender inequality. In Indonesia, women continue to carry the largest share of unpaid care work which constrains their labour force participation, economic autonomy, and access to decent work. Against this background, this thesis asks: how has UN Women advocacy contributed to the progress of care economy policy in Indonesia? The study employs a qualitative research design using process tracing and triangulation. It combines document analysis with interviews. The analytical framework is grounded in Feminist Economics in order to conceptualize care as economic infrastructure and to assess policy change through the 3R framework: Recognition, Reduction, and Redistribution. The findings show that UN Women has made a meaningful but not exclusive contribution to the advancement of Indonesia's care economy policy. This contribution is visible in the broader policy environment surrounding the Care Economy Roadmap 2024-2045, the establishment of the Care Economy Working Group, and the use of care-related language in national planning discourse. This thesis also finds that policy progress in Indonesia's care economy is real but gradual. Progress is strongest in recognition, further movement is visible in reduction through implementation mechanism, yet redistribution remains more limited. This thesis contributes to International Relations by showing that international organizations can influence domestic policy not only through formal agreements or material power, but also through soft governance, norm diffusion, technical assistance, and coalition building.

Keywords: UN Women; care economy; Feminist Economics; policy advocacy

**PERAN ADVOKASI UN WOMEN TERHADAP
KEBIJAKAN EKONOMI PERAWATAN DI INDONESIA**

Estu Sarwo Mukti
23/511810/PSP/07879

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji peran advokasi UN Women dalam kemajuan kebijakan ekonomi perawatan di Indonesia antara tahun 2018 dan 2025. Penelitian ini berangkat dari pengakuan bahwa pekerjaan perawatan tidak berbayar masih menjadi salah satu fondasi paling persisten dari ketidaksetaraan gender. Di Indonesia, perempuan terus memikul bagian terbesar dari pekerjaan perawatan tidak berbayar yang membatasi partisipasi mereka dalam angkatan kerja, otonomi ekonomi, serta akses terhadap pekerjaan layak. Dengan latar belakang tersebut, tesis ini mengajukan pertanyaan: bagaimana advokasi UN Women berkontribusi terhadap kemajuan kebijakan ekonomi perawatan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode pelacakan proses dan triangulasi. Penelitian ini juga menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara. Kerangka analitis penelitian ini berlandaskan pada Ekonomi Feminis untuk mengonseptualisasikan perawatan sebagai infrastruktur ekonomi dan menilai perubahan kebijakan melalui kerangka 3R: Pengakuan (Recognition), Pengurangan (Reduction), dan Redistribusi (Redistribution). Temuan penelitian menunjukkan bahwa UN Women memberikan kontribusi yang bermakna, meskipun tidak eksklusif, terhadap kemajuan kebijakan ekonomi perawatan di Indonesia. Kontribusi ini terlihat dalam lingkungan kebijakan yang lebih luas seputar Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2024-2045, pembentukan Kelompok Kerja Ekonomi Perawatan, serta penggunaan bahasa terkait perawatan dalam wacana perencanaan nasional. Tesis ini juga menemukan bahwa kemajuan kebijakan ekonomi perawatan di Indonesia bersifat nyata tetapi bertahap. Kemajuan paling kuat terlihat pada aspek pengakuan, sementara perkembangan lebih lanjut tampak pada aspek pengurangan melalui mekanisme implementasi, namun aspek redistribusi masih lebih terbatas. Tesis ini berkontribusi pada studi Hubungan Internasional dengan menunjukkan bahwa organisasi internasional dapat memengaruhi kebijakan domestik tidak hanya melalui perjanjian formal atau kekuatan material, tetapi juga melalui tata kelola lunak (soft governance), difusi norma, bantuan teknis, dan pembangunan koalisi.

Kata-kata Kunci:

UN Women; ekonomi perawatan; Ekonomi Feminis; advokasi kebijakan